**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Akhir Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Akhir Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2021, Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran , serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Rembang Tahun 2019 dan 2020 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

Dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, September 2021

CAMAT REMBANG

Drs.MUSTHOLIH,MM

Pembina Tingkat I

NIP.19650312 199503 1 001

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hal |
| KATA PENGANTAR ………………………………………………………... | i |
| DAFTAR ISI ………………………………………………………... | ii |
| DAFTAR TABEL ………………………………………………………... | iii |
|  |  |
| BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………. | 1 |
| * 1. Latar Belakang   2. Landasan Hukum   3. Maksud dan Tujuan   4. Sistematika Penulisan | 1  3  4  5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 6 |
| * 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Kab. Rembang Tahun 2020   2. Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang   3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang   4. Review terhadap RKPD | 6  20  21  22 |
| BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM KEGIATAN | 28 |
| * 1. Tujuan dan Sasaran Renja   2. Program dan Kegiatan | 28  29 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG TAHUN 2022 | 35 |
| BAB V PENUTUP | 44 |

**DAFTAR TABEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hal |
|  |  |  |
| Tabel 2.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Rembang Tahun 2020 ……….. | 7 |
| Tabel 2.2 | Penyerapan Anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2019-2020…………………………………………………………… | 14 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Kab. Rembang berdasarkan Indikator Sasaran Renstra Th. 2016-2021 Tahun 2020……………………………………………………………………………... | 18 |
| Tabel 2.4 | Review Terhadap RKPD Tahun 2022 Kabupaten Rembang ……………………………………………………… | 23 |
| Tabel 2.5 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang | 27 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rembang Tahun 2016-2021 | 29 |
| Tabel 3.2 | Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 | 30 |
| Tabel 3.3 | Persandingan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Lama dan Baru | 33 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 | 36 |

LAMPIRAN ………..

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ……. TAHUN 2022

**RENCANA KERJA KECAMATAN REMBANG**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi , konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepsi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

* + 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
    11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
    13. Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
  1. **Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2022 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

**1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2022 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2022;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang tujuan,sasaran dan kegiatan dari penyusunana Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Rembang.

BAB V. PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasarannya.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

|  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Renstra Lama | Renstra Baru | Renstra Lama | Renstra Baru | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 |
| **4.1.1** | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | |
| 401 | Urusan Administrasi Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **401.7** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** |  | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum |  | 90% |  | 100 | 98,30 | 98,30 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.7.1 | Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/umum yang diterapkan dengan baik |  | 100% | 100 | 100 | 93,66 | 93,66 | 100 | 100 | 100 |
| 401.7.2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang disusun |  | 3 Dokumen | 100 | 100 | 99,01 | 99,01 | 100 | 100 | 100 |
| 401.7.3 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur |  | Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik |  | 8 Dokumen | 100 | 100 | 99,15 | 99,15 | 100 | 100 | 100 |
| 401.7.4 | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan |  | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik |  | 3 Dokumen | 100 | 100 | 99,90 | 99,90 | 100 | 100 | 100 |
| **401.8** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah |  | 90% | 100 | 100 | 96,83 | 96,83 | 100 | 100 | 100 |
| 401.8.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun |  | 3 Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401.8.2 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun |  | 2 Dokumen | 100 | 100 | 96,83 | 96,83 | 100 | 100 | 100 |
| **401.9** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** |  | jumlah informasi yang di sampaikan publik |  | 90% | 100 | 100 | 77,08 | 77,08 | 100 | 100 | 100 |
| 401.9.1 | **Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik** |  | Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik |  | 3 Informasi | 100 | 100 | 77,08 | 77,08 | 100 | 100 | 100 |
| 401.82 | Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa |  | Nilai 6 | 100 | 100 | 94,48 | 94,48 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Nilai 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat |  | Nilai 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban |  | Nilai 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 401.82.1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan |  | Persentase Pemerintahan Desa /Kelurahan yang tertib administrasi |  | 100% | 100 | 100 | 94,37 | 94,37 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Persentase Pemerintahan Desa /Kelurahan yang lunas Bayar PBB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.82.2 | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara Swakelola |  | 100% | 100 | 100 | 95,03 | 95,03 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Persentase Penetapan APBDes Tepat waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.82.3 | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |  | Persentase Lembaga Kesejahteraan masyarakat desa/Kelurahan yang aktif |  | 100% | 100 | 100 | 94,96 | 94,96 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rehabilitasi Pendopo Kecamatan |  | Jumlah pendopo yang direhab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.82.4 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |  | Persentase Penyelesaian Permasalahan K-3 (Ketentraman,Ketertiban dan Keindahan) |  | 100% | 100 | 100 | 97,20 | 97,20 | 100 | 100 | 100 |

Adapun penyerapan anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2.**

**Penyerapan Anggaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

**Tahun 2019 - 2020**

| **No** | **URAIAN BELANJA** | **ANGGARAN** | | **REALISASI ANGGARAN** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TH. 2019** | | **TH. 2020** | |
| **TH. 2019** | **TH 2020** | **Rp.** | **%** | **Rp.** | **%** |
|  | **BELANJA** | **12.806.841.269** | **11.274.851.996** | **12.343.020.738** | **96,38** | **10.755.459.317** | **95,39** |
| **A.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **5.925.978.669** | **5.954.886.091** | **5.745.038.532** | **96,95** | **5.683.316.871** | **95,44** |
| 1 | Belanja Pegawai | 5.925.978.669 | 5.954.886.091 | 5.745.038.532 | 96,95 | 5.683.316.871 | 95,44 |
| 2 | Gaji dan tunjangan | 4.349.978.669 | 4.568.486.091 | 4.230.207.532 | 97,25 | 4.409.490.871 | 96,52 |
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.576.000.000 | 1.386.400.000 | 1.514.831.000 | 96,12 | 1.273.826.000 | 91,88 |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** | **6.880.862.600** | **5.319.965.905** | **6.597.982.206** | **95,89** | **5.072.142.446** | **95.34** |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1.013.474.027** |  | **1.013.474.027** | **100** |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 100 |  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.750.000 |  | 14.087.877 | 71,13 |  |  |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 85.250.000 |  | 274.200.000 | 100 |  |  |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 23.146.600 |  | 23.139.650 | 99,97 |  |  |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.000.000 |  | 15.520.000 | 97,00 |  |  |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.000.000 |  | 4.000.000 | 100 |  |  |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 100 |  |  |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 100 |  |  |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 35.500.000 |  | 33.900.000 | 95,49 |  |  |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 5.000.000 |  | 5.000.0000 | 100 |  |  |
| 11 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan | 80.500.000 |  | 1800.500.000 | 100 |  |  |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 30.000.000 |  | 27.000.000 | 90,00 |  |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **552.100.000** |  | **537.707.400** | **97,39** |  |  |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 12.000.000 |  | 12.000.000 | 100 |  |  |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 21..000.000 |  | 20.963.000 | 99,82 |  |  |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Kantor | 15.000.000 |  | 14.470.000 | 96,47 |  |  |
| 4 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 258.500.000 |  | 253.561.400 | 98,09 |  |  |
| 5 | Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Air | 12.600.000 |  | 12.600.000 | 100 |  |  |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana lingkungan Kecamatan | 30.000.000 |  | 30.000.000 | 100 |  |  |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor | 55.000.000 |  | 54.905.700 | 100 |  |  |
| 8 | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Dinas | 10.000.000 |  | 9.928.000 | 99 |  |  |
| 9 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor | 125.000.000 |  | 119.148.000 | 95,32 |  |  |
| 10 | Rehabilitasi Pendopo Kecamatan | 75.000.000 |  | 71.965.000 | 95,95 |  |  |
| **III** | **Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan** | **2.000.000** |  | **2.000.000** | **100** |  |  |
| 1 | Penyusunan Renstra,Renja | 10.000.000 |  | 9.995.000 | 99,95 |  |  |
| **IV** | **Program Penunjang Pemerintah Desa** | **6.010.616.000** |  | **5.752.882.279** | **95,71** |  |  |
| 1 | Fasilitasi PATEN (Pelayanan Aministratif Terpadu dan Pelayanan Umum | 50.000.000 |  | 50.000.000 | 100 |  |  |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa | 135.000.000 |  | 133.549.450 | 98,93 |  |  |
| 3 | Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Penyelenggaraan Musrenbang | 56.000.000 |  | 55.994.700 | 99,99 |  |  |
| 5 | Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi Pembantu | 42.100.000 |  | 42.035.000 | 99,85 |  |  |
| 6 | Fasilitasi PKK | 45.000.000 |  | 44.009.000 | 97,80 |  |  |
| 7 | Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat | 40.000.000 |  | 19.249.400 | 48,12 |  |  |
| 8 | Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Aset Program Nasional peamberdayaan masyarakat mandirai perkotaan | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Fasilitasi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | 40.000.000 |  | 38.970.000 | 100 |  |  |
| 10 | Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Quran | 35.000.000 |  | 29.466.900 | 100 |  |  |
| 11 | Promosi PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) | 5.590.000 |  | 4.509.600 | 0 |  |  |
| 12 | Validasi Data miskin Tingkat Kecamatan | 5.000.000 |  | 4.550.250 | 0 |  |  |
| 13 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo | 683.138.000 |  | 661.997.100 | 99,88 |  |  |
| 14 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah | 683.138.000 |  | 668.577.500 | 98,98 |  |  |
| 15 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari | 890.138.000 |  | 879.672.150 | 98,31 |  |  |
| 16 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar | 640.138.000 |  | 597.126.579 | 99,18 |  |  |
| 17 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon | 810.138.000 |  | 777.217.500 | 99,04 |  |  |
| 18 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari | 883.138.000 |  | 828.767.050 | 96,37 |  |  |
| 19 | Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh | 733.138.000 |  | 722.341.650 | 68,62 |  |  |
| 20 | Pemberdayaan Forum kelembagaan perempuan dan anak Tingkat kecamatan | 15.000.000 |  | 12.660.000 | 84,40 |  |  |
| 21 | Penunjang Pemilihan Kepala Desa | 36.000.000 |  | 32.625.000 | 90,63 |  |  |
| 22 | Fasiloitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan | 25.400.000 |  | 21.216.650 | 83,53 |  |  |
| 23 | Penguatan Pokjanal Posyandu | 10.000.000 |  | 4.580.000 | 45,80 |  |  |
| 24 | Fasilitasi penyusunan Profil Desa | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 100 |  |  |
| 25 | Penguatan pendidikan karakter anak usia dini | 122.460.000 |  | 101.417.000 | 82,82 |  |  |
| **V** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** |  | **1.192.419.760** |  |  | **1.172.147.640** | **98,30** |
| 1 | Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum |  | 182.163.011 |  |  | 170.607.405 | 93,66 |
| 2 | Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur |  | 854.356.749 |  |  | 845.873.335 | 99,01 |
| 3 | Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur |  | 10.000.000 |  |  | 9.914.950 | 99,15 |
| 4 | Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan |  | 45.900.000 |  |  | 145.751.950 | 99,90 |
| **VI** | **Program Perencaaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah** |  | **17.890.000** |  |  | **17.639.600** | **96,83** |
|  | Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah |  | 10.000.000 |  |  | 9.999.900 | 100 |
|  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah |  | 7.890.000 |  |  | 7.639.700 | 96,83 |
| **VII** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** |  | **2.400.000** |  |  | **1.850.000** | **77,08** |
|  | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik |  | 2.400.000 |  |  | 1.850.000 | 77,08 |
| **VIII** | **Program peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan ketentraman Masyarakat** |  | **4.107.256.145** |  |  | **3.880.505.206** | **94,48** |
|  | Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan |  | 3.688.832.145 |  |  | 3.481.291.556 | 94,37 |
|  | Fasilitasi peberdayaan Masyarakat Desa |  | 187.095.000 |  |  | 177.799.600 | 95,03 |
|  | Fasilitasi Peningkatan Kesejhateraan Masyarakat |  | 153.529.000 |  |  | 145.791.550 | 94,96 |
|  | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Massyarakat |  | 77.800.000 |  |  | 75.622.500 | 97,20 |

Dari segi anggaran terdapat penurunan pada tahun 2019 senilai Rp. 12.806.841.269,- dan pada Tahun 2020 senilai Rp. 11.274.851.996,- berkurang Rp. 1.531.989.273,-

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Berdasarkan Indicator, Sasaran Renstra Tahun 2016-2021 Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | %  Capaian | % Capaian | % Capaian | RPJMD | |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Target akhir 2021 | % Capaian 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatkan  kualitas pelayanan Publik Kecamatan Rembang | IKM Kecamatan Rembang | 78 | na | na | na | na | na | na |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa | % Desa maju,mandiri | 55% | 55,56 | 101,10 | 0 | 0 | 75% | 101,10 |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.25 jt | 75% | 77,78 | 103,70 | 0 | 0 | 83% | 103,70 |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas kelurahan | % Persentase Kelurahan yang lunas bayar PBB | 20% | 28,57 | 142,85 | 142,85 | 142,85 | 30% | 142,85 |

Berdasarkan tabel 2.3, maka dapat dilihat bahwa:

1. Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama : **“Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Rembang “** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih NA karena belum melakukan surve kepuasan masyarakat.
2. Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua**” Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa”**

Sasaran strategis kedua Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, dengan indicator persentase desa maju mandiri dengan target 55% dengan realisasi 55,56% dari 27 desa dengan kriteria 15 desa maju dan mandiri adapun data kemandirian desa klasifikasi kemandirian desa Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut ;

* Sebanyak 1 desa dengan klasifikasi Mandiri yaitu Desa Mondoteko.
* Sebanyak 14 desa dengan klasifikasi Maju yaitu Desa Kedungrejo, Turusgede, Kumendung, Pandean, Punjulharjo, Tritunggal, Pasar Banggi, Ngotet, Sumberjo, Tasikagung, Sawahan, Sukoharjo, Kabongan Kidul, Tireman.
* Sebanyak 12 desa dengan klasifikasi Berkembang yaitu Desa Sridadi, Tlogomojo, Kasreman, Gedangan, Weton, Ngadem, Ketanggi, Pulo, Waru, Gegunung Wetan, Padaran, Kabongan Lor.

Untuk indikator sasaran kedua yaitu persentase desa maju mandiri sebesar 55% tercapai 55,56% dengan kriteria sangat berhasil Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Perhitungan Realisasi Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Desa Maju & mandiri | X 100 % |
| Jumlah Desa Yang Ada |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 Desa | X 100 % = 55,56% |
| 27 Desa |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 101,10%. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan capaian Kinerja Tahun 2020 :

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi | X 100 % |
| Target Capaian |

|  |  |
| --- | --- |
| 55,56 | X 100 % = 101,10% |
| 55 |

1. **Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”**

Sasaran strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan indikator Persentasi Desa dengan Swadaya masyarakat lebih dari 25 jt tercapai 103,70% dari 27 desa dengan target 75 %

Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat kita lihat target capaian untuk sasaran strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2020 adalah sebesar 75%. Untuk mengetahui realisasi capaian pada Tahun 2020, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Desa yang nilai Swadaya lebih dari 25 Jt | X 100 % |
| Jumlah Desa |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | X 100 % = 77,78% |
| 27 |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 77,78 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Presentasi Realisasi (5) | X 100 % |
| Presentasi Target Capaian (4) |

|  |  |
| --- | --- |
| 77,78 | X 100 % = 103,70% |
| 75 |

1. **Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Keempat “Meningkatkan Kinerja dan kapasitas kelurahan”**

Sasaran strategis keempat Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini, dengan indicator persentase Kelurahan yang lunas bayar PBB dengan target 20 % dengan realisasi 28,57% dari 7 kelurahan yang lunas bayar hanya 2 kelurahan

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Kelurahan yang lunas bayar PBB | X 100 % |
| Jumlah Kelurahan yang ada |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 Kelurahan | X 100 % = 28,57% |
| 7 Kelurahan |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2019 adalah sebesar 142,82%. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2019 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan capaian Kinerja Tahun 2019 :

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi | X 100 % |
| Target Capaian |

|  |  |
| --- | --- |
| 28,57 | X 100 % = 142,85% |
| 20 |

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparat kecamatan Rembang untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

* 1. **Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partispasi masyarakat dalam pembangunan desa.
   1. **Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rembang.**

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan,maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Rembang harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat,sebagai perencana,pelaksana dan evaluasi secara independen,obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1. Camat
2. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   1. **Review terhadap RKPD**

Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2022. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Review Terhadap RKPD Tahun 2022 Kabupaten Rembang**

| **NO** | **RKPD 2021** | | | | | | **HASIL ANALISA KEBUTUHAN** | | | | | | **CATATAN PENTING** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **SAT** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **SAT** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **KECAMATAN REMBANG** | | | |  | **15.398.785.000** | **KECAMATAN REMBANG** | | | |  | **13.456.690.000** |  |
| **A** | **Urusan Umum** | | | |  | **15.398.785.000** | **Urusan Perencanaan** | | | |  | **13.456.690..000** |  |
| **I** | **Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota** | Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum | % | 95% | **Kab. Rembang** | **7.217.685.000** | **Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota** | Porsentase Ketercapaian Pelayanan Umum | % | 95% | **Kec Rembang** | **7.320.590.000** |  |
| **Perencanaan ,Pengganggaran dan EvaluasiKinerja perangkat daerah** | Jumlah Dokumenpoerencanaan yang disusun | dok | 2 dok | Kec Rembang | **35.000.000** |  |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen pelaporan keuangan Dengan Baik | dok | 3 dok | Kec Rembang | **6.445.090.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Administrasi kepegawaian Perangkat daera** | Prosentase pemenuhuan Pelayanan administrasi Kepegawaian | dok | 2 dok | Kec Rembang | **281.500.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | Prosentase pemenuhuan Pelayanan administrasi Kepegawaian | dok | 100% | Kec Rembang | **206.000.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Prosentase pemenuhuan Pelayanan administrasi perkantoran | % | 100% |  | **178.000.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Prosentase Pengelolaan Barang Milik daerah Yang di keloal Dengan Baik | % | 100% |  | **175.000.000** |  |
| II | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik** | Prosentase lembaga Kesejahteraan Masayarakat Desa /Kelurahan yang Aktif |  | 7 |  | **596.100.000** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik** | Prosentase lembaga Kesejahteraan Masayarakat Desa /Kelurahan yang Aktif |  | 7 |  | **339.100.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Pelaksanaan Uruasan Pemerintahan yang Dilimpahakan kepada camat** | Prosentase lembaga Kesejahteraan Masayarakat Desa /Kelurahan yang Aktif | % | 100 |  | **339.100.000** |  |
| **III** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola |  | 7 |  | **7.765.000.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % | 100 |  | **5.518.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % | 100 |  | **152.000.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % | 100 |  | **5.366.000.000** |  |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3( ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ) | % | 7 |  | **150.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3( ketertiban, Keamanan, dan Keindahan ) | % | 100 |  | **126.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum | Prosentase Penyelsaian Permasalahan K-3 | % | 100 |  | **126.500.000** |  |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Prosentase Pemerintahan Desa Yang tertib Administrasi | % | 7 |  | **210.000.000** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Prosentase Pemerintahan Desa Yang tertib Administrasi | % | 100 |  | **152.500.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasai pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase Pemerintahan Desa Yang tertib Administrasi | % | 100 |  | **152.500.000** |  |

Secara umum, rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2022 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/ Volume** | **Catatan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penataan Tempat Pemancingan di RT 05 RW 01 Kelurahan Magersari Kec Rembang | Kec.Rembang | Persentase sarana adan Prasarana dalam Kondisi baik | 30.000.000 | Pokok pokok pikiran DPRD |

**BAB III  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

**3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja**

**A. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik .

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan Bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1. **Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rembang selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Pelayanan Kecamatan Rembang**

**Tahun 2016-2021**

| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN / SASARAN** | **KINERJA TUJUAN / SASARAN** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALISASI** | | | | **TARGET** | |
| 20166 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah” | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Rembang |  | Nilai SAKIP Kecamatan Rembang | na | na | 49,85 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kec. Rembang | na | na | na | 70 | 78,5-82,25 | 82,26- 88 |
| 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kec. Rembang | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rembang | na | na | 49,85 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
| 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kec. Rembang | Nilai Keterbukaan Informasi publik | na | na | na | na | 90 | 95 |

**3.2 Program dan kegiatan**

Renja Kecamatan Rembang kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan RKPD Tahun 2021 secara rinci rumusan Program dan kegiatan kecamatan Rembang Kabupaten Rembang 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.2**

**Program dan Kegiatan Jangka Menengah**

**Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**

**Tahun 2022**

| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | |  | **PROGRAM DAN KEGIATAN** | | | **INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN** | **TARGET TAHUN 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | |  | **4** | | | **5** | **6** |
| **I** | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |  | |  |  | | | Indeks Pelayanan Publik /IPP | 3,1 |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | |  |  | | | Indek Kepuasan Masyarakat/ IKM | 83 |
|  |  |  | | **I** | Program Penunjang urusan Pemerintahan Desa/Kota | | | Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Rembang | 60 |
|  |  |  |  |  | **1** | Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | % Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah | 85% |
|  |  |  |  |  |  | |  | % Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik | 100% |
|  |  |  |  |  |  | |  | % dok anggaran dengan kualitas baik | 80% |
|  |  |  |  |  |  | |  | % dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik | 80% |
|  |  |  |  |  | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik | 100% |
|  |  |  |  |  | 3 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % pemenuhan pelayanan umum | 100% |
|  |  |  |  |  | 4 | | Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang uarusan pemerintahan Daerah | % BMD dengan baik | 80% |
|  |  |  |  |  | 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik | 100% |
|  |  |  |  |  | 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah | %pemenuhan pelayanan Administrasi paerkantoran | 100% |
|  |  |  |  | **II** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik** | | | **Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat** | **7** |
|  |  |  |  |  |  | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kaepada camat | % penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani | 100% |
|  |  |  |  | **III** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | | | **% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat** | **7** |
|  |  |  |  |  |  | | | Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,- | **21 desa** |
|  |  |  |  |  | 1 | | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa | %pelaksanaan Pembangunan secara Swakelola | 100% |
|  |  |  |  |  |  | |  | Persentase Penetapan APBDesa &Penyampaian SPJ tepat waktu | 100% |
|  |  |  |  |  | 2 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel | 100% |
|  |  |  |  | **IV** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | **% desa dengan tata kelola pemerintahan baik** | **95%** |
|  |  |  |  |  |  | | Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa | Rata rata IKM desa | 65 |
|  |  |  |  |  |  | |  | Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB | 95 |
|  |  |  |  | **V** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum** | | | **Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum** | **7** |
|  |  |  |  |  |  | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum | Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan ketertiban umum | 100 % |

**Tabel 3.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Persandingan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Lama dan Baru**   | **RENSTRA LAMA** | | **RENSTRA BARU** | | | --- | --- | --- | --- | | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | | 1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 1. Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan 4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1. Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | | 1. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 1. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Dan Ketentraman Masyarakat | 1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pembinaan Ketrentraman Dan Ketertiban Masyatrakat 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | 1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | |  |  | 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | |
|  |
|  |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN REMBANG**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik dan Pelayanan**
9. Pelaksanaan Urusan PEmerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
10. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
13. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. **Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5 program yang masuk dalam urusan umum serta 11 kegiatan dan 67 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.456.690.000. Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang  
Tahun 2022**

| **KODE** | **URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN** | | **INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)** | **SAT** | **RINCIAN TAHUN 2022** | | | | | | **TAHUN 2023** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARGET CAPAIAN** | **LOKASI** | **PAGU INDIKATIF APBD** | **PAGU INDIKATIF APBDN PROP** | **PAGU INDIKATIF APBN** | **CATATAN PENTING** | **TARGET** | **KEBUTUHAN DANA** |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| **7** | **UNSUR KEWILYAHAN** | |  |  |  |  | **13.456.690.000** |  |  |  |  | **13.589.680.176** |
| **7.01** | **KECAMATAN** | |  |  |  |  | **13.456.690.000** |  |  |  |  | **13.589.680.176** |
| **7.01.01** | 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** |  |  |  | **Kec. Rembang** | **7.320.590.000** |  |  |  |  | **7.145.890.000** |
|  |  |  | **Nilai sakip OPD** | **Angka** | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan ,Pengganggaran dan EvaluasiKinerja perangjat daerah** | | **Persentase Keselarasan perencanaan terhadap capaian Kinerja perangkat Daerah** | **%** | **85** | **Kec. Rembang** | **35.000.000** |  |  |  |  | **71.800.000** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | % Dokumen Perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik | % | 100 | Kec. Rembang | 10.000.000 |  |  |  | dok | 12.100.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | % Dokumen anggaran dengan kualitas baik | % | 80 | Kec. Rembang | 10.000.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | % Dokumen Evaluasi kinerja dengan kualitas baik | % | 80 | Kec. Rembang | 15.000.000 |  |  |  |  | 39.700.000 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **% Dokumen pelaporan keuangan Dengan kualitas Baik** | **%** | **100** | **Kec. Rembang** | **6.445.090.000** |  |  |  |  | **6.445.090.000** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | | % ASN yang terlayani gaji&tunjangan | % | 100 | Kec. Rembang | 6.285.090 |  |  |  |  | 6.285.090 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasai Keuangan SKPD | | % penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik | % | 80 | Kec. Rembang | 150.000.000 |  |  |  |  | 150.000.000 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | % rekomendasi hasil Review LKPD oleh inspektorat yang ditindaklanjuti | % | 80 | Kec. Rembang | 10.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi kepegawaian Perangkat daerah** | | **% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik** | % | 100 | **Kec. Rembang** | **281.500.000** |  |  |  |  | **50.000.000** |
| 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | | % dokumen pemetaan kepegawaian yang dikelola dengan baik | % | 100 | Kec. Rembang | 230.000.000 |  |  |  |  | 0 |
| 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | | % ASN yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil bintek/diklat dengan baik | % | 90 | Kec. Rembang | 51.500.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Prosentase pemenuhuan Pelayanan umum** | % | 100 | **Kec. Rembang** | **206.000.000** |  |  |  |  | **206.000.000** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Prosentase pemenuhuan Pelayanan penerangan bangunan kantor | % | 100 | Kec. Rembang | 7.000.000 |  |  |  |  | 7.000.000 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Prosentase Penyediaan peralatan &perlengkapan kantor | % | 80 | Kec. Rembang | 70.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Prosentase pemenuhuan penyediaan peralatan rumah tangga | % | 80 | Kec. Rembang | 10.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | % pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | % | 80 | Kec. Rembang | 40.000.000 |  |  |  |  | 60.000.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | % pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | % | 80 | Kec. Rembang | 10.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | % pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | % | 80 | Kec. Rembang | 4.000.000 |  |  |  |  | 4.000.000 |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan material | | % pemenuhan Penyediaan Bahan/Material | % | 80 | Kec. Rembang | 35.000.000 |  |  |  |  | 35.000.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasai dan konsultasi SKPD | | % rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti | % | 80 | Kec. Rembang | 30.000.000 |  |  |  |  | 30.000.000 |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | **Kec. Rembang** | **178.000.000** |  |  |  |  | **193.000.000** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | | % pelayanan surat menyurat dengan baik | % | 100 | Kec. Rembang | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | | % pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik | % | 100 | Kec. Rembang | 50.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | % pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik | % | 100 | Kec.Rembang | 125.000.000 |  |  |  |  | 140.000.000 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang/milik daerahpenunjang utama pemerintah daerah** | | % BMD dengan kondisi Baik | % | 80 | **Kec.Rembang** | **175.000.000** |  |  |  |  | **180.000.000** |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peroranagn Dinas atau kendaraan dinasajabatan | | % kendaraan dinas dengan kondisi baik | % | 80 | Kec.Rembang | 35.000.000 |  |  |  |  | 50.000.000 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | % peralatan/perlengkapan kantor dengan kondisi baik | % | 80 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  |  | 35.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | % Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik | % | 100 | Kec.Rembang | 90.000.000 |  |  |  |  | 70.000.000 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | % sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan kondisi baik | % | 100 | Kec.Rembang | 25.000.000 |  |  |  |  | 25.000.000 |
| **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik** | | **Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat** | **%** | **100** | **Kec.Rembang** | **339.100.000** |  |  |  |  | **500.000.000** |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | | % penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakata yang ditangani | % | 100 | Kec.Rembang | 339.100.000 |  |  |  |  | 500.000.000 |
| **7.01.02.2.04.03** | **Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan** | | Jumlah dokumen/pelaporam fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik | % | 100 | **Kec.Rembang** | **339.100.000** |  |  |  |  | **500.000.000** |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase kontribusi dana desa/ kelurah5an untuk pemberdayaan masyarakat** | **%** | 100 | **Kec.Rembang** | **5.518.000.000** |  |  |  |  | **5.463.790.176** |
| **7.01.03.2** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % | **100** | **Kec.Rembang** | **152.000.000** |  |  |  |  | **300.000.000** |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | % Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir | % | **100** | Kec.Rembang | 60.000.000 |  |  |  |  | 150.000.000 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti | % | **100** | Kec.Rembang | 92.000.000 |  |  |  |  | 150.000.000 |
| **7.01.03.2** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | **Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabael** | % | **100** | Kec.Rembang | **5.366.000.000** |  |  |  |  | 5.163.790.176 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | Cakupan penyelenenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum | % | **100** | **Kec.Rembang** | **126.500.000** |  |  |  |  | **150.000.000** |
| **7.01.04.2.03** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum** | % | **100** | **Kec.Rembang** | **126.500.000** |  |  |  |  | **150.000.000** |
| 7.01.04.2.03.01 | sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | | Persentase sinergitas dengan kepolisian negara Republik indoneasia,tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan | % | **100** | Kec.Rembang | 126.500.000 |  |  |  |  | 150.000.000 |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik | % | **95** | **Kec.Rembang** | **152.500.000** |  |  |  |  | **330.000.000** |
| **7.01.06.2** | **Fasilitasi Rekomendasi dan koordinaasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa** | | Rata-rata IKM Desa | angka | 65 | Kec.Rembang | **152.500.000** |  |  |  |  | 330.000.000 |
| 7.01.06.2.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi | % | **95** | Kec.Rembang | 122.500.000 |  |  |  |  | 300.000.000 |
| 7.01.06.2.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten | % | **95** | Kec.Rembang | 30.000.000 |  |  |  |  | 30.000.000 |

**BAB V  
PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kegiatan Kantor Kecamatan Rembang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang,yang dalam penyusunannya mengacu pada rencana strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2021. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

**Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara *jujur, konsisten, transparan*.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Rembang dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022.

CAMAT REMBANG

Drs.MUSTHOLIH,MM

Pembina Tingkat I

NIP.19650312 199503 1 001